

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG
TAHUN ANGGARAN 2016 – 2017***ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN GOVERNMENT OF BITUNG CITY
FOR THE 2016 – 2017*

Oleh:

**Yudi Fajriansyah¹
Inggriani Elim²
Stanley Kho Walandouw³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi,
Universitas Sam Ratulangi

E-Mail:

¹ansyah28@ymail.com²inggriani_elim@unsrat.ac.id³stanleykho99@gmail.com

Abstrak: Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung tahun anggaran 2016 – 2017 dengan menggunakan alat ukur kinerja. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang tujuannya setiap data dihimpun, dikelompokkan, dianalisis, disajikan, dan ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bitung dilihat dari analisis varian dan pertumbuhan dapat dikategorikan baik, sedangkan untuk analisis rasio keuangan dinilai tidak baik. Kinerja keuangan belanja daerah Pemerintah Kota Bitung dilihat dari analisis varian dan pertumbuhan dapat dikategorikan baik, sedangkan untuk analisis rasio keserasian belanja operasi dapat dikategorikan serasi sehingga rasio keserasian belanja modal kurang serasi. Sebaiknya Pemerintah Kota Bitung dapat meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi yang ada sehingga tidak selalu mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Kata kunci: *anggaran, kinerja keuangan, alat ukur kinerja*

Abstract: *The regional revenue and expenditure budget is one tool to improve public services and public welfare in accordance with the objectives of regional autonomy. This study aims to measure the financial performance in Government of Bitung city for 2016-2017 by using performance measurement tools. The method of analysis in this study is a descriptive method in which the purpose of each data collected, grouped, analyzed, presented, and drawn a conclusion and the type of research is qualitative descriptive. The results showed that in general the financial performance revenue in government of Bitung City viewed from the analysis of variance and growth can be categorized as good, while for the analysis of financial ratios considered not good. The financial performance expenditure in the government of Bitung City can be seen from the analysis of variance and growth can be categorized as good, while for the analysis of the ratio of the harmony of operating expenditures can be categorized harmoniously so that the ratio of capital expenditure harmony is less harmonious. The Bitung City Government should be able to increase PAD by maximizing the existing potential so that it does not always rely on assistance from the Central Government.*

Keywords: *budget, financial performance, performance measurement tools*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang di Asia Tenggara yang mengalami perkembangan cukup pesat untuk akuntansi dan organisasi sektor publik karena hal tersebut diikuti dengan adanya peralihan masa ke era reformasi. Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah terciptanya *good governance*. Saat ini *good governance* menjadi tuntutan bangsa Indonesia karena masyarakat ingin Pemerintah mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pemerintahan.

Sehubungan dengan adanya reformasi, Pemerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan dua undang – undang yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem pemerintahan dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi sehingga memberikan kemudahan kontrol dibanding dengan sentralisasi, setelah diberlakukannya undang undang tersebut maka Pemerintah Daerah telah diberikan tanggung jawab yang mengharuskan Pemerintah Daerah lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari otonomi daerah (Dora, 2017). Perubahan sistem pemerintahan membawa juga perubahan pada sistem hubungan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentunya memiliki hubungan yang berkaitan karena dengan adanya peralihan wewenang Pemerintah pusat ke daerah maka harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan Pemerintah Pusat untuk mengolah keuangan daerahnya (Rahayu, 2016).

Untuk pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran. Usaha Pemerintah Daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Suatu Pemerintahan Daerah yang mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik maka telah melaksanakan otonomi daerah karena ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan ke pihak pusat harus diminimalkan. Namun pada kenyataannya, sudah belasan tahun sejak otonomi daerah diberlakukan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah masih sangat tergantung dari pihak pusat. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya maka perlu pengukuran kinerja keuangan (Hakim, 2018).

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah karena pada laporan tersebut menyediakan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah (Assidiqi, 2014).

Lahirnya otonomi daerah di Indonesia mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan dan sistem keuangan pada Kota Bitung, karena itu Pemerintah Kota Bitung sebagai pihak yang diserahi tugas dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Kota Bitung berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Pada penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung maka digunakan analisis varians, pertumbuhan dan rasio keuangan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Pura (2013:4) akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perikayasaan dalam penyedia jasa, yang berupa informasi keuangan dari suatu unit organisasi dan cara menyampaikan informasi tersebut kepada pihak berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2015:1) akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang

dibutuhkan oleh pihak – pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga – lembaga tinggi negara dan departemen – departemen dibawahnya.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bentuk – bentuk laporan keuangan khususnya laporan keuangan sektor publik di Indonesia adalah sebagai berikut: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Halim dan Kusufi (2014:2) berpendapat bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Mahmudi (2016:162) menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatan atau program sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis varians, pertumbuhan dan rasio keuangan data keuangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penelitian Terdahulu

Lampa dan Sabijono (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan DPKAP Kabupaten Minahasa Selatan apabila dilihat secara keseluruhan belum cukup baik. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian dan menganalisis pendapatan daerah sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya menganalisis kinerja pendapatan daerah.

Liando dkk., (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan PEMKAB Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value For Money*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PEMKAB Kepulauan Sangihe belum baik. Persamaan penelitian ini menggunakan metode penelitian dan menganalisis APBD sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan konsep value for money.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena tujuannya memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung dengan melakukan penghimpunan data laporan realisasi anggaran sehingga dapat memberikan gambaran jelas mengenai perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung.

Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Bitung
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dimulai pada bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2019.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
 - a. Data kualitatif pada penelitian ini adalah gambaran umum Kota Bitung.
 - b. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah angka yang sudah tersedia didalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bitung tahun 2016 – 2017.
2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer yang digunakan sebagai sumber penelitian yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, dengan menggunakan beberapa cara:

1. Wawancara, peneliti sudah mempersiapkan sejumlah pertanyaan untuk ditanya kepada pimpinan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung untuk mendapatkan penjelasan mengenai masalah penelitian.
2. Dokumentasi, peneliti memperoleh beberapa salinan atau arsip dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bitung tahun 2016 – 2017.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif karena bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai status subjek dalam kondisi tertentu dengan cara menghimpun, mengelompokkan, menganalisis, menyajikan, dan mengambil simpulan.

Teknik Analisis Data

1. Peneliti mengumpulkan data laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bitung tahun 2016 – 2017
2. Peneliti mengklasifikasikan realisasi dan anggaran dari pendapatan dan belanja daerah
3. Peneliti melakukan analisis pendapatan daerah dengan menggunakan beberapa perhitungan, yaitu:

- a. Varian Pendapatan Daerah (Mahsun, 2016:152)

$$\frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$
- b. Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Mahmudi, 2016:162)

$$\frac{\text{Total Realisasi Pendapatan (t)} - \text{Total Realisasi Pendapatan (t - 1)}}{\text{Total Realisasi Pendapatan (t - 1)}} \times 100\%$$
- c. Rasio Keuangan Pendapatan Daerah
 1. Kemandirian Keuangan Daerah (Mahsun, 2016:153)

$$\frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kemudian diklasifikasikan dalam standar penilaian rasio kemandirian keuangan daerah

Tabel 1. Standar Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kategori	Rasio
Sangat Rendah	≥ 0 – 25%
Rendah	≥ 25 – 50%
Sedang	≥ 50 – 75%
Tinggi (Mandiri)	≥ 75 – 100%

Sumber: Lubis dan Hafni, 2017.

Jika hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan menunjukkan presentase yang tinggi maka Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

2. Ketergantungan Keuangan Daerah (Mahmudi, 2016:170)

$$\frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Transfer}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian diklasifikasikan dalam standar penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah

Tabel 2. Standar Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kategori	Rasio
Tinggi	$\geq 75 - 100\%$
Sedang	$\geq 50 - 75\%$
Rendah	$\geq 25 - 50\%$
Sangat Rendah	$0 - 25\%$

Sumber : Dwiranda, 2007 dalam Mianti, 2014.

Jika hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan menunjukkan presentase yang tinggi maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

3. Derajat Desentralisasi (Mahmudi, 2016:169)

$$\frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian diklasifikasikan dalam standar penilaian rasio derajat desentralisasi

Tabel 3. Standar Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi

Kategori	Rasio
Tidak Baik	$\leq 10\%$
Kurang Baik	$\geq 10 - 25\%$
Baik	$\geq 25 - 50\%$
Sangat Baik	$\geq 50\%$

Sumber: Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratinigrum, 2015.

Jika hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi menunjukkan presentase yang tinggi maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

4. Selanjutnya menganalisis belanja daerah dengan menggunakan beberapa perhitungan, yaitu:

a. Varian Belanja Daerah (Mahsun, 2016:152)

$$\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Pertumbuhan Belanja Daerah (Mahmudi, 2016:162)

$$\frac{\text{Total Realisasi Belanja (t)} - \text{Total Realisasi Belanja (t - 1)}}{\text{Total Realisasi Belanja (t - 1)}} \times 100\%$$

c. Rasio Keserasian Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (Mahsun, 2016:154)

1. Belanja Operasional

$$\frac{\text{Total Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Belanja Modal

$$\frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian diklasifikasikan dalam standar penilaian rasio keserasian belanja

Tabel 4. Standar Penilaian Rasio Keserasian Belanja

Kategori	Rasio
Tidak Serasi	$0 - 20\%$
Kurang Serasi	$\geq 20 - 40\%$
Cukup Serasi	$\geq 40 - 60\%$
Serasi	$\geq 60 - 80\%$

Sumber : Mahmudi, 2010:164 dalam Syafitri, 2014.

Jika hasil perhitungan rasio keserasian belanja menunjukkan presentasenya semakin tinggi dalam mengalokasikan dana untuk belanja operasional maka presentase dari belanja modal yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Bitung

Kota Bitung terletak pada posisi geografis $1^{\circ}23'23'' - 1^{\circ}35'39''$ LU dan $125^{\circ}1'43'' - 125^{\circ}18'13''$ BT. Wilayah daratan Kota Bitung mempunyai luas 31.350,35 ha, terbagi dalam delapan wilayah kecamatan serta 69 kelurahan yang sebelumnya terbagi atas lima kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Madidir yang

memiliki delapan kelurahan, Kecamatan Matuari yang memiliki delapan kelurahan, Kecamatan Girian yang memiliki 7 kelurahan, Kecamatan Lembeh Selatan yang memiliki tujuh kelurahan, Kecamatan Lembeh Utara yang memiliki sepuluh kelurahan, Kecamatan Aertambaga yang memiliki sepuluh kelurahan, Kecamatan Maesa yang memiliki delapan kelurahan dan Kecamatan Ranowulu yang memiliki sebelas kelurahan.

Hasil Penelitian

1. Analisis Pendapatan Daerah

a. Varian Pendapatan Daerah

Tabel 5. Perhitungan Varian Pendapatan Daerah (Dalam ribuan Rupiah)

TA.	Pendapatan			
	Anggaran	Realisasi	Varian/Selisih	Presentase
2016	894.060.802.521,00	850.221.225.724,63	(43.839.546.796,37)	-95,10%
2017	814.006.889.763,00	869.634.357.168,04	55.627.467.405,04	106,83%
Total	1.708.067.692.284,00	1.719.855.582.892,6	11.787.890.608,67	100,69%

Sumber : BPKAD Kota Bitung (diolah),2019.

Tabel 5 menunjukkan bahwa varian pendapatan daerah Kota bitung pada tahun 2016 mengalami selisih kurang yaitu Rp (43.839.546.796,37) sehingga kinerja pendapatan daerah kurang baik, namun pada tahun 2017 kinerja pendapatan daerah sudah baik karena ada selisih lebih yaitu Rp 55.627.467.405,04. Secara umum kinerja pendapatan daerah Kota Bitung sudah baik karena adanya total selisih lebih yaitu Rp 11.787.890.608,67. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Assidiqi (2014) di kabupaten Klaten yang menunjukkan hasil kinerja keuangan yang baik.

b. Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tabel 6. Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah TA. 2016 – 2017 (Dalam ribuan Rupiah)

TA.	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Presentase
2016	724.062.475.263,30	850.221.255.724,63	126.158.780.461,33	17,42%
2017	850.221.255.724,63	869.634.357.168,04	19.413.101.443,41	2,28%
Total	1.574.283.730.987,9	1.719.855.612.892,6	145.571.881.904,74	9,24%

Sumber : BPKAD Kota Bitung (diolah),2019.

Tabel 6 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah Kota Bitung dapat dikatakan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan total pertumbuhan positif sebesar 9,24%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 17,42% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 2,28%. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Lampa (2016) di Dinas Pengelolah Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan yang menunjukkan hasil pertumbuhan pendapatan daerah yang positif.

c. Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 7. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Dalam ribuan Rupiah)

TA.	TRPAD	TRPT	Rasio	Kategori
2016	82.927.096.690,63	714.878.128.677,00	11,60%	Sangat Rendah
2017	122.773.221.957,04	721.207.135.211,00	17,02%	Sangat Rendah
Total	205.700.318.647,67	1.436.085.263.888,00	14,32%	Sangat Rendah

Sumber : BPKAD Kota Bitung (diolah),2019.

Tabel 7 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 11,60% dan naik pada tahun 2017 menjadi 17,02%. Secara umum dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung sangat rendah karena total presentase yaitu sebesar 14,32%. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Pilat dan Morasa (2017) di Pemerintah Kota Manado yang menunjukkan hasil rasio kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah.

2. Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 8. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Dalam ribuan Rupiah)

TA.	TRPT	TRPD	Rasio	Kategori
2016	714.878.128.677,00	850.221.255.724,63	84,08%	Tinggi
2017	721.207.135.211,00	869.634.357.168,04	82,93%	Tinggi
Total	1.436.085.263.888,00	1.719.855.612.892,6	83,50%	Tinggi

Sumber : BPKAD Kota Bitung (diolah),2019.

Tabel 8 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 84,08% dan pada tahun 2017 sebesar 82,93%. Secara umum dapat dilihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung tinggi karena total presentase yaitu sebesar 83,50%. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Dora (2017) di Pemerintah Kota Yogyakarta yang menunjukkan hasil rasio ketergantungan keuangan daerah tergolong tinggi.

3. Derajat Desentralisasi

Tabel 9. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi (Dalam ribuan Rupiah)

TA.	TRPAD	TRPD	Rasio	Kategori
2016	82.927.096.690,63	850.221.255.724,63	9,75%	Tidak Baik
2017	122.773.221.957,04	869.634.357.168,04	14,11%	Kurang Baik
Total	205.700.318.647,67	1.719.855.612.892,6	11,96%	Kurang Baik

Sumber : BPKAD Kota Bitung (diolah),2019.

Tabel 9 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Pemerintah Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 belum baik. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 rasio derajat desentralisasi sebesar 9,75% dan pada tahun 2017 sebesar 14,11%. Secara umum dapat dilihat bahwa tingkat derajat desentralisasi Pemerintah Kota Bitung kurang baik karena total presentase yaitu sebesar 11,96%. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Adhiantoko (2013) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bora yang menunjukkan hasil rasio derajat desentralisasi tergolong sangat rendah sehingga termasuk kategori kurang baik.

4. Analisis Belanja Daerah

a. Varian Belanja Daerah

Tabel 10. Perhitungan Varian Belanja Daerah (Dalam ribuan Rupiah)

TA.	Belanja			
	Anggaran	Realisasi	Varian/Selisih	Presentase
2016	889.342.884.605,10	799.459.099.837,00	(89.883.784.768,10)	-89,89%
2017	852.115.020.577,73	819.983.300.290,00	(32.131.720.287,73)	-96,23%
Total	1.741.457.905.182,8	1.619.442.400.127,00	(122.015.505.055,83)	-92,99%

Sumber : BPKAD Kota Bitung (diolah),2019.

Tabel 10 menunjukkan bahwa varian belanja daerah tahun 2016, Pemerintah Kota Bitung menggunakan 89,89% dari jumlah yang dianggarkan, dan tahun 2017 menggunakan 96,23% dari jumlah yang dianggarkan. Secara keseluruhan Kota Bitung memiliki total varian belanja sebesar Rp (122.015.505.055,83) artinya kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung dinilai baik karena realisasi belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Bitung menggunakan kurang dari 100% dari jumlah yang dianggarkan sehingga kinerja keuangan baik. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Syafitri (2014) di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas yang menunjukkan hasil kinerja keuangan yang baik.

b. Pertumbuhan Belanja Daerah

Tabel 11. Perhitungan Pertumbuhan Belanja Daerah TA. 2016 – 2017 (Dalam ribuan Rupiah)

TA.	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Presentase
2016	756.178.490.437,00	799.459.099.837,00	43.280.609.400,00	5,72%
2017	799.459.099.837,00	819.983.300.290,00	20.524.200.453,00	2,56%
Total	1.555.637.590.274,00	1.619.442.400.127,00	63.804.809.853,00	4.10%

Sumber : BPKAD Kota Bitung (diolah),2019.

Tabel 11 menunjukkan bahwa kinerja keuangan belanja daerah dilihat dari analisis pertumbuhan belanja daerah Kota Bitung dapat dikatakan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan total pertumbuhan yang positif sebesar 4.10%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 5,72%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 2,56%. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Palilingan dkk., (2015) di Dinas Pendapatan Kota Manado yang menunjukkan hasil pertumbuhan belanja daerah yang positif.

c. Rasio Keserasian Belanja Operasional dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

1. Belanja Operasional

Tabel 12. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasional (Dalam ribuan Rupiah)

TA.	TRBO	TRBD	Rasio	Kategori
2016	576.326.853.942,00	799.459.099.837,00	72,08%	Serasi
2017	616.810.148.673,00	819.983.300.290,00	75,22%	Serasi
Total	1.193.137.002.615,00	1.619.442.400.127,00	73,67%	Serasi

Sumber : BPKAD Kota Bitung (diolah), 2019.

2. Belanja modal

Tabel 13. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal (Dalam ribuan Rupiah)

TA.	TRBM	TRBD	Rasio	Kategori
2016	222.967.119.701,00	799.459.099.837,00	27,88%	Kurang Serasi
2017	200.434.060.632,00	819.983.300.290,00	24,44%	Kurang Serasi
Total	423.401.180.333,00	1.619.442.400.127,00	26,14%	Kurang Serasi

Sumber : BPKAD Kota Bitung (diolah), 2019.

Pada tabel 12 dan 13 dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 belanja daerah Kota Bitung sebesar Rp 799.459.099.837,00 dan naik menjadi Rp 819.983.300.290,00 pada tahun 2017. Total realisasi belanja operasi daerah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Masing-masing sebesar Rp 576.326.853.942,00 dan Rp 616.810.148.673,00, sedangkan total realisasi belanja modal mengalami penurunan. Masing – masing sebesar Rp 222.967.119.701,00 dan Rp 200.434.060.632,00. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Arifa (2017) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang menunjukkan hasil total belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi sehingga untuk belanja modal tergolong kecil.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka bab yang terakhir dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah
 - a. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bitung dilihat dari varian pendapatan daerah pada tahun 2016 dapat dikategorikan kurang baik karena realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan tetapi pada tahun 2017 realisasi pendapatan lebih dari jumlah yang dianggarkan sehingga kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung dapat dikategorikan baik. Apabila dilihat secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung dapat dikategorikan baik artinya realisasi pendapatan lebih dari jumlah yang dianggarkan.
 - b. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bitung dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 – 2017 tumbuh secara positif. Pertumbuhan PAD mengalami penurunan dan kenaikan. Apabila dilihat secara keseluruhan total pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bitung tumbuh secara positif artinya Pemerintah Kota Bitung mampu mempertahankan dan meningkatkan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.
 - c. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bitung dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2016 – 2017 dapat dikategorikan sangat rendah karena berada dalam skala interval 0 – 25% dan memiliki pola hubungan instruktif artinya Pemerintah Pusat lebih banyak berperan dibanding Pemerintah Kota Bitung.
 - d. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bitung dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah tahun anggaran 2016 – 2017 dapat dikategorikan tinggi karena berada dalam skala interval 75 – 100% artinya Pemerintah Kota Bitung masih tergantung kepada Pemerintah Pusat.
 - e. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bitung dilihat dari rasio derajat desentralisasi tahun anggaran 2016 – 2017 dapat dikategorikan kurang baik karena berada dalam skala interval 0 – 25% artinya kontribusi PAD dalam menyelenggarakan desentralisasi masih relatif kecil.
2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah
 - a. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bitung dilihat dari varian belanja daerah tahun anggaran 2016 – 2017 dapat dikategorikan baik karena realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan artinya Pemerintah Kota Bitung telah melakukan penghematan anggaran atau realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja.
 - b. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bitung dilihat dari pertumbuhan belanja daerah tahun anggaran 2016 – 2017 tumbuh secara positif. Pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal mengalami kenaikan dan penurunan. Apabila dilihat secara keseluruhan total pertumbuhan belanja daerah Kota Bitung tumbuh secara

positif artinya Pemerintah Kota Bitung mampu mempertahankan dan meningkatkan realisasi belanja dari tahun sebelumnya.

- c. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bitung dilihat dari rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya artinya Pemerintah Kota Bitung lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan mencoba mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bitung lebih meningkatkan PAD sehingga tidak selalu mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Apabila Pemerintah Kota Bitung mampu memaksimalkan potensi yang ada seperti industri, perdagangan dan pariwisata maka pajak dan retribusi yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan PAD akan meningkat. Selain itu, Pemerintah Kota Bitung juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan PAD.
2. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan lebih banyak lagi rasio keuangan, menambah periode tahun penelitian dan memperluas lingkup wilayah peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, H. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 – 2011). *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/17846>. Diakses tanggal 7 Juni 2019.
- Arifa, Naima Khoirul. 2017. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan Terhadap PSAP 02 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011 – 2015. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1686>. Diakses tanggal 12 Februari 2019.
- Assidiqi, B. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2012. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/15963>. Diakses tanggal 25 Januari 2019.
- Dora, J. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2014. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. http://repository.usd.ac.id/12237/2/132114125_full.pdf. Diakses tanggal 15 Februari 2019.
- Hakim, M. F. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 – 2016. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. <https://dspace.uii.ac.id>. Diakses tanggal 2 Maret 2019.
- Halim, A. dan Muhammad, S. K. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Lampa, L. dan Hariyanto, S. 2016. Analisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelolah Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.4, No.1, Hal.056-066. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses tanggal 13 April 2019.
- Liando, H. S., David, P. E. S. dan Inggriani, E. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value For Money*. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.2, No.3, Hal.1686-1694. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses tanggal 29 April 2019.
- Lubis, P. K. D. dan Nurlia, H. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 – 2013. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara. Vol.1, No.1, Hal.21-45. <http://jurnal.uinsu.ac.id>. Diakses tanggal 10 Mei 2019.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPF, Yogyakarta.
- Mianti, R. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir. *Skripsi*. Universitas Bengkulu. Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/8197/2/1%20CII%20CIII%20CI-14-rar-FE.pdf>. Diakses tanggal 9 April 2019.

- Palilingan, A. F., Harijanto, S. dan Lidia, M. 2015. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado*. Vol.3, No.1, Hal.17-25. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses tanggal 19 Maret 2019.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah"*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Undang Undang No. 8 Tahun 2006 tentang "Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah"*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang "Standar Akuntansi Pemerintahan"*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah"*. Jakarta.
- Pilat, J. J. dan Jenny, M. 2017. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015. *Jurnal Accountability*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.6, No.1, Hal.45-56. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses tanggal 15 Juni 2019.
- Pura, R. 2013. *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Erlangga, Jakarta.
- Rahayu, R. P. 2016. Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Makro Manajemen*. Universitas Madura, Madura. Vol.1, No.1, Hal.57-78. http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_makro_manajemen/article/download/244/200. Diakses tanggal 21 Mei 2019.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sundari, dan Suprantiningrum, Rr. 2015. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009 – 2013). *Media Ekonomi dan Manajemen*. Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. Vol.30, No.1, Hal.30-40. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/232/295>. Diakses tanggal 5 Juni 2019.
- Syafitri, A. 2014. Analisis Varians, Pertumbuhan dan Keserasian Belanja Dalam Menilai Kinerja Anggaran Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. *Skripsi*. Universitas Musi Rawas. Lubuklinggau. <http://www.unmura.ac.id>. Diakses tanggal 3 Juni 2019.